

Apakah efektivitas pemerintah dan pengendalian korupsi mendukung stabilitas politik?

Nafis Dwi Kartiko

Directorate General of Taxes, Ministry of Finance of the Republic of Indonesia
Universitas Pelita Harapan. Jl. M. H. Thamrin Boulevard 1100 Lippo Village Tangerang 15811 - Indonesia
nafisdwikartiko@gmail.com

*Corresponding Author

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki hubungan antara efektivitas pemerintah, pengendalian korupsi, dan stabilitas politik. Data yang digunakan bersumber dari World Competitiveness Yearbook yang disediakan oleh Institute for Management Development. Analisis melibatkan data tahunan yang dikumpulkan secara teratur sejak 1987, yang mencakup sampel global dari 66 negara selama enam tahun, dari 2017 hingga 2022, dengan total 381 observasi. Regresi Ordinary Least Squares (OLS) digunakan untuk menyelidiki penelitian ini. Hasil penelitian mengkonfirmasi pentingnya pengendalian korupsi dan efektivitas pemerintah dalam menjaga stabilitas politik. Analisis ini membedakan pengaruh efektivitas pemerintah berdasarkan kualitas produk politik suatu negara, dan menemukan bahwa peningkatan efektivitas pemerintah sangat penting dalam meningkatkan stabilitas politik di negara-negara dengan kualitas produk politik yang rendah. Hal ini menandakan bahwa di negara-negara dengan tantangan politik dan ekonomi yang lebih besar, peningkatan efektivitas pemerintah dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap stabilitas politik.

Kata Kunci: Efektivitas Pemerintah; Pengendalian Korupsi; Kualitas Produk Politik Tinggi; Kualitas Produk Politik Rendah; Stabilitas Politik;

How to Cite: Kartiko, N. D. (2024). Does government effectiveness and corruption control support political stability?. *Integritas* : *Jurnal Antikorupsi*, 10(1), 81-94.
<https://doi.org/10.32697/integritas.v10i1.1209>



Pendahuluan

Studi empiris telah menunjukkan bahwa institusi yang kuat merupakan faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara (Abubakar, 2020; Nawaz et al., 2023). Efektivitas tata kelola pemerintahan yang efektif mencakup transparansi, akuntabilitas, dan stabilitas politik, yang secara langsung berkontribusi pada pembangunan sosial-ekonomi melalui peningkatan kepercayaan investor, peningkatan efisiensi administrasi publik, dan pengurangan korupsi (M. Hassan & Zeb, 2021; Poniatowicz et al., 2020). Efektivitas pemerintah merupakan faktor penting yang memengaruhi berbagai aspek tata kelola pemerintahan dan pembangunan sosial-ekonomi (Nae et al., 2024; Shah et al., 2019). Hal ini berdampak pada peningkatan pendapatan pemerintah dan distribusi serta alokasi sumber daya yang efisien di masyarakat. Penelitian Thiao's (2021) menunjukkan korelasi positif dan signifikan antara efektivitas pemerintah dan peningkatan pendapatan. Sumber ini menunjukkan bahwa manajemen pemerintah yang efisien dapat meningkatkan pengumpulan pendapatan negara dengan menerapkan sistem perpajakan yang lebih baik dan pengelolaan sumber daya negara yang transparan dan akuntabel. Selain itu, efektivitas pemerintah juga mempengaruhi tingkat individualisme daerah, seperti yang ditunjukkan oleh Horita dan Takezawa (2018). Hal ini mengindikasikan bahwa keberhasilan pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai lokal dapat mendorong kemandirian dan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan. Asongu (2016) juga mengungkapkan bahwa efektivitas pemerintah merupakan faktor penentu yang signifikan dalam menarik investasi asing langsung (FDI). Investor asing mencari iklim investasi yang stabil dan dapat diprediksi, yang sering kali bergantung pada kebijakan pemerintah yang konsisten dan memiliki efek jangka panjang. Kebijakan yang efektif dan adil menciptakan lingkungan yang ramah bisnis, mengurangi risiko, dan memberikan kepastian hukum bagi investor.

Selain efektivitas pemerintah, pengendalian korupsi merupakan pilar penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Ketiadaan kontrol yang efektif terhadap korupsi memiliki dampak yang luas dan mendalam, yang merugikan tata kelola pemerintahan, pembangunan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Korupsi mengikis kepercayaan publik terhadap pemerintah, yang pada gilirannya mengurangi kepercayaan publik terhadap upaya pemerintah dalam memberantas korupsi (Morris & Klesner, 2010). Di daerah dengan tingkat pengendalian korupsi yang rendah, pemberantasan korupsi menjadi semakin sulit, sehingga menekankan pentingnya dinamika tata kelola pemerintahan yang baik dalam mengatasi korupsi (Asongu, 2013). Selain itu, mekanisme kontrol yang tidak efektif, terutama dalam hal gaji pejabat, dapat berkontribusi pada merebaknya korupsi. Hal ini sering ditemukan di negara-negara berkembang yang memiliki keterbatasan sumber daya, di mana kurangnya pemberdayaan pejabat melalui kompensasi yang memadai dapat menjadi pemicu tindakan koruptif (Berdaliyeva et al., 2023).

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki hubungan antara efektivitas pemerintah dan pengendalian korupsi terhadap stabilitas politik. Diakui bahwa efektivitas pemerintah dan stabilitas politik saling bergantung dan merupakan faktor penting yang membentuk dinamika pemerintahan dan stabilitas sosial-politik secara keseluruhan. Beberapa penelitian telah menyelidiki korelasi antara efektivitas pemerintah dan stabilitas politik, dengan menekankan saling ketergantungan dan dampaknya terhadap hasil tata kelola pemerintahan (Krishnan & Teo, 2012). Efektivitas pemerintah, yang mengacu pada kapasitas pemerintah untuk mengembangkan dan melaksanakan kebijakan secara efisien, telah diakui sebagai faktor penentu yang sangat penting bagi stabilitas politik. Penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pemerintah dapat memoderasi secara positif hubungan antara infrastruktur informasi dan pengembangan e-government, yang berkontribusi terhadap peningkatan praktik tata kelola pemerintahan dan stabilitas politik (Krishnan & Teo, 2012). Selain itu, efektivitas pemerintah telah dikaitkan dengan peningkatan kepercayaan terhadap lembaga-lembaga pemerintah, yang dapat meningkatkan stabilitas politik dengan mendorong kepercayaan publik terhadap mekanisme pemerintahan.

Sebaliknya, stabilitas politik, yang mengacu pada tidak adanya kekerasan dan kemungkinan destabilisasi pemerintah, sangat penting untuk menjaga keberlangsungan pemerintahan dan keharmonisan masyarakat (Tchamyu, 2021). Berbagai penelitian telah mengaitkan stabilitas politik dengan peningkatan transparansi dalam pelaporan dan praktik tata kelola pemerintahan, meningkatkan akuntabilitas pemerintah, dan mengurangi risiko gangguan politik (Hearn, 2011). Selain itu, stabilitas politik juga ditemukan berkorelasi positif dengan kemungkinan transparansi dalam pelaporan gaji, yang menunjukkan perannya dalam mendorong akuntabilitas dan mengurangi peluang korupsi (Hearn, 2011). Dampak gabungan dari efektivitas pemerintah dan stabilitas politik terhadap tata kelola pemerintahan dan pembangunan ekonomi adalah signifikan. Berbagai studi telah menekankan bahwa faktor-faktor ini dan dimensi tata kelola lainnya secara nyata memengaruhi pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan (Alkali et al., 2022; Asongu & Odhiambo, 2019). Mekanisme tata kelola yang kuat, termasuk efektivitas pemerintah dan stabilitas politik, telah dikaitkan dengan tingkat kemiskinan yang lebih rendah dan hasil ekonomi yang lebih baik (Asongu & Odhiambo, 2019).

Pengendalian korupsi dan stabilitas politik memiliki keterkaitan yang erat dan secara signifikan mempengaruhi dinamika tata kelola pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian telah banyak mengkaji hubungan antara pengendalian korupsi dan stabilitas politik, yang mengungkapkan keterkaitan dan pengaruhnya terhadap hasil tata kelola pemerintahan. Pengendalian korupsi, yang didefinisikan sebagai kemampuan untuk mencegah dan memerangi praktik korupsi di masyarakat, terkait erat dengan stabilitas politik. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pengendalian korupsi yang efektif berkaitan dengan peningkatan stabilitas politik, karena korupsi mengikis legitimasi lembaga-lembaga politik dan dapat menyebabkan ketidakstabilan (S. A. Hassan, 2017). Sebaliknya, stabilitas politik sangat penting untuk menjaga pengendalian korupsi yang efektif, karena lingkungan politik yang tidak stabil dapat menciptakan lahan subur bagi kegiatan korupsi untuk berkembang (Onafowora & Owoye, 2024). Hubungan antara pengendalian korupsi dan stabilitas politik bersifat dua arah. Pengendalian korupsi dapat meningkatkan stabilitas politik dengan menumbuhkan kepercayaan terhadap lembaga-lembaga pemerintah dan mendorong transparansi. Sebaliknya, stabilitas politik dapat memfasilitasi pengendalian korupsi

yang efektif dengan memastikan kesinambungan dalam tata kelola pemerintahan dan penegakan hukum (Khan & Farooq, 2019). Penelitian telah menyoroti bahwa korupsi merusak stabilitas politik, menyebabkan keresahan sosial, dan melemahkan kerangka kerja tata kelola pemerintahan (Dankumo et al., 2019).

Penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan menguji peran efektivitas pemerintah dan pengendalian korupsi dalam mempengaruhi stabilitas politik di negara-negara dengan Kualitas Produk Politik yang berbeda-beda, dengan menggunakan data terbaru dari tahun 2017 hingga 2022. Area ini belum banyak dieksplorasi dalam literatur sebelumnya. Temuan ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi para pembuat kebijakan dalam merancang strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan stabilitas politik melalui peningkatan efektivitas tata kelola pemerintahan dan pengendalian korupsi. Data yang diperbarui ini memungkinkan analisis yang lebih relevan mengenai kondisi sosial-politik saat ini dan tren pembangunan yang sedang berlangsung. Meliputi 66 negara, studi ini mencakup variasi geografis dan ekonomi yang signifikan, sehingga memperkaya pemahaman mengenai pengaruh efektivitas pemerintahan dan pengendalian korupsi terhadap stabilitas politik. Penelitian-penelitian sebelumnya belum mengeksplorasi topik ini secara ekstensif, terutama dari perspektif kelompok negara dengan Kualitas Produk Politik tinggi-rendah. Penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut dengan membedah bagaimana efektivitas pemerintah dan pengendalian korupsi beroperasi dan berdampak pada konteks yang berbeda, tergantung pada kualitas produk politik masing-masing negara. Dengan pendekatan ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru mengenai strategi praktis untuk mendorong stabilitas politik melalui peningkatan efektivitas pemerintah dan pengendalian korupsi.

Penelitian ini memberikan kontribusi yang berarti, baik secara praktis maupun teoritis, untuk memahami efektivitas pemerintah dan pengendalian korupsi. Secara teoritis, penelitian ini memperluas literatur dengan mengintegrasikan variabel-variabel terbaru yang mempengaruhi stabilitas politik dan memberikan model analisis baru untuk menguji pengaruhnya dalam konteks global yang beragam. Secara praktis, temuan penelitian ini merupakan masukan penting bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi pengendalian korupsi yang lebih efektif, dengan mempertimbangkan kerangka kerja kebijakan yang telah terbukti dan kondisi sosial-politik yang ada. Kontribusi praktis mencakup rekomendasi kebijakan yang spesifik untuk setiap negara, dengan fokus pada peningkatan efektivitas pemerintah dan pengendalian korupsi untuk mendukung stabilitas politik. Temuan-temuan penelitian ini juga bermanfaat bagi lembaga-lembaga internasional dan lembaga swadaya masyarakat dalam menganalisis dan mendukung program-program antikorupsi di berbagai negara. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada pengetahuan akademis dan upaya praktis dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan bebas korupsi.

Metode

Data dan Sampel

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari World Competitiveness Yearbook, yang disediakan oleh Institute for Management Development, sebuah organisasi pendidikan dan penelitian yang berbasis di Lausanne, Swiss. Situs web resmi mereka adalah www.imd.ch, yang menawarkan akses publik ke data yang diperlukan (Institute for Management Development, 2023). Penelitian ini melibatkan data tahunan yang dikumpulkan secara teratur sejak tahun 1987, yang mencakup sampel negara secara global. Sampel penelitian ini, khususnya, terdiri dari data yang diperoleh selama enam tahun, dari 2017 hingga 2022, yang mencakup 66 negara. Kami memilih data antara tahun 2017 dan 2022 untuk memastikan relevansi analisis dengan kondisi sosio-ekonomi dan politik terkini dan untuk menghindari bias dari perubahan besar dalam dinamika global yang terjadi selama tiga dekade terakhir. Jumlah total observasi yang dikumpulkan adalah 381. Responden utama yang memberikan masukan terhadap data adalah pelaku usaha yang beroperasi di negara-negara yang dievaluasi, yang memberikan perspektif dari tangan pertama mengenai kondisi ekonomi dan efektivitas tata kelola pemerintahan di masing-masing negara.

Operasionalisasi Variabel Penelitian

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Stabilitas Politik, sedangkan variabel independen yang digunakan adalah Efektivitas Pemerintah dan Pengendalian Korupsi. Pada variabel Efektivitas Pemerintah terdapat tiga proksi yang digunakan, sedangkan variabel kontrol yang digunakan adalah Suara dan Akuntabilitas dan *Rule of Law* (menggunakan empat proksi pengukuran). Tabel 1 adalah operasionalisasi variabel yang digunakan dalam penelitian. Dalam operasionalisasi variabel berikut, semua variabel merupakan variabel indeks.

Tabel 1. Operasionalisasi Variabel

Variabel	Operasionalisasi
Variabel Dependen	
Stabilitas Politik (PV)	“Risiko ketidakstabilan politik sangat rendah (Kristjánssdóttir & Óskarsdóttir, 2021b).”
Variabel Independen	
Efektivitas	
Pemerintah1 (GE1)	“Kemampuan adaptasi kebijakan pemerintah terhadap perubahan ekonomi tinggi (Duho et al., 2020; Kristjánssdóttir & Óskarsdóttir, 2021a).”
Efektivitas	
Pemerintah 2 (GE2)	“Birokrasi tidak menghambat aktivitas bisnis (Papageorgiadis et al., 2014; Ruiz et al., 2017).”
Efektivitas	
Pemerintah 3 (GE3)	“Infrastruktur distribusi barang dan jasa secara umum efisien (Bergman et al., 2016; Duho et al., 2020).”
Pengendalian	
Korupsi (CC)	“Bribery and corruption do not exist (Chourou et al., 2021; Liu et al., 2020).”
Variabel Kontrol	
Suara dan	
Akuntabilitas (VA)	“Transparansi kebijakan pemerintah cukup memuaskan (Kristjánssdóttir & Óskarsdóttir, 2021a, 2021b; Rashid et al., 2021).”
Aturan Hukum 1	
(RL1)	“Penggelapan pajak bukanlah ancaman bagi perekonomian Anda (Brown, 2020; Hurduzeu et al., 2022).”
Aturan Hukum 2	
(RL2)	“Keadilan ditegakkan secara adil (Irac & Lopez, 2015; Page & Torres Jr, 2021).”
Aturan Hukum 3	
(RL3)	“Ekonomi paralel (pasar gelap, tidak tercatat) tidak mengganggu pembangunan ekonomi (Kaufmann & Kraay, 2023).”
Aturan Hukum 4	
(RL4)	“Hak kekayaan intelektual ditegakkan secara memadai (Liu et al., 2020).”

Model Ekonometrik dan Prosedur Estimasi

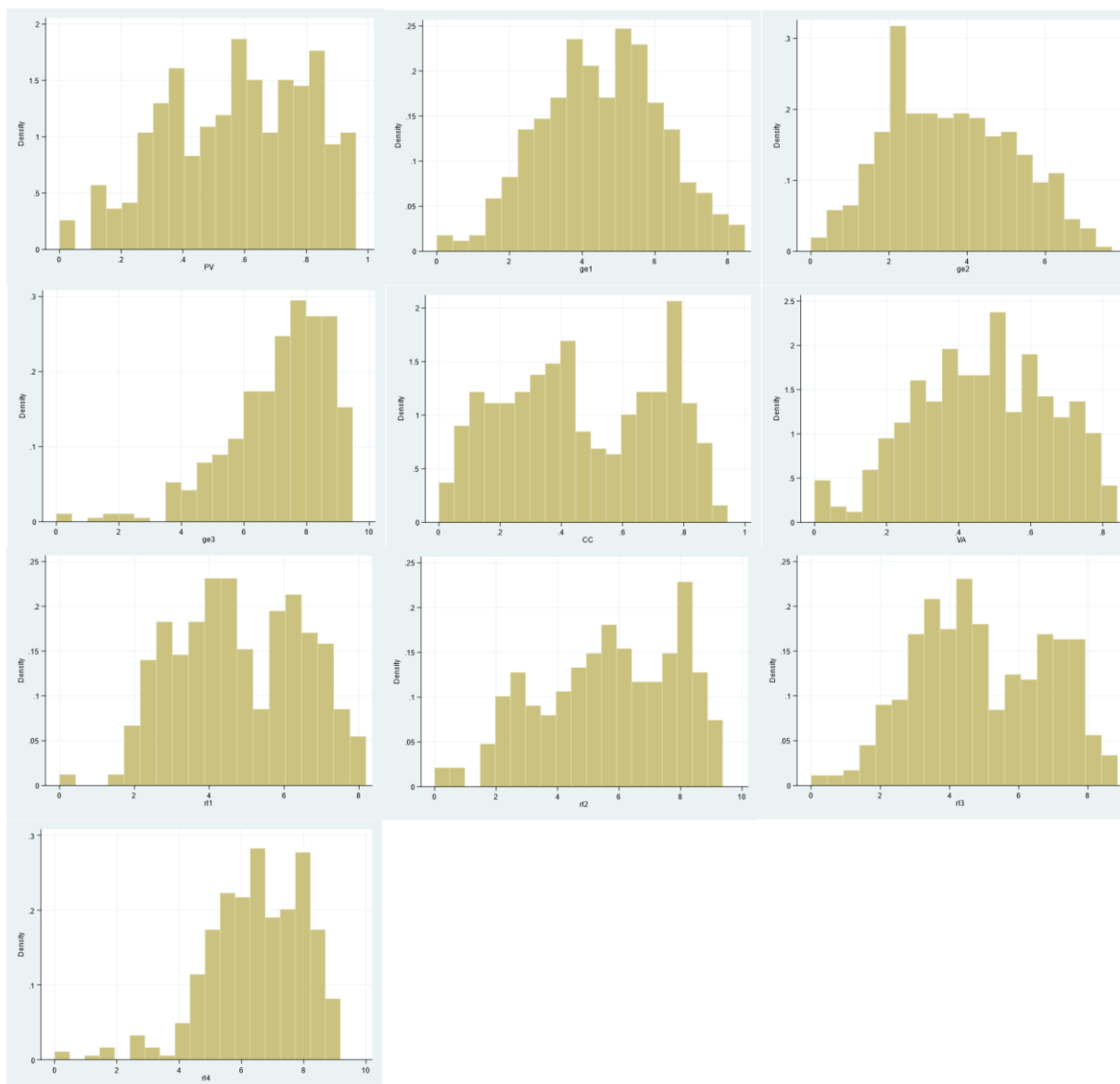
Penelitian ini menggunakan model ekonometrik dengan data panel, yang menggabungkan data runtun waktu selama enam tahun terakhir dan data silang (*cross-section*) yang mencakup 66 negara. Model regresi Ordinary Least Squares (OLS) dipilih untuk menganalisis pengaruh efektivitas pemerintah dan pengendalian korupsi terhadap stabilitas politik. Variabel dependen dalam model ini adalah Political Stability (PV), sedangkan variabel independennya meliputi Government Effectiveness 1 (GE1), Government Effectiveness 2 (GE2), Government Effectiveness 3 (GE3), dan Corruption Control (CC). Selain itu, penelitian ini juga mempertimbangkan variabel kontrol, yang meliputi Voice and Accountability (VA) dan empat aspek Rule of Law (RL1, RL2, RL3, dan RL4). Variabel $C_{(i,d)}$ mewakili variabel kontrol, yang meliputi Suara dan Akuntabilitas (VA) dan empat aspek Rule of Law (RL1, RL2, RL3, dan RL4). Setiap variabel dalam model direpresentasikan sebagai indeks dengan nilai mulai dari 1 hingga 10, yang memungkinkan perbandingan standar di seluruh negara dan waktu. Berdasarkan plot histogram dari setiap variabel dalam model, distribusi variabel menunjukkan bahwa meskipun terdapat variasi, distribusi data relatif mendekati normal (Gambar 1). Berikut ini adalah model ekonometrik yang digunakan dalam penelitian ini.

$$PV_{i,d} = \beta_0 + \beta_1 \sum_{x=1}^3 GE_{(i,d)x} + \beta_2 CC_{i,d} + \beta_3 C_{i,d} + \epsilon$$

Keterangan:

i = data cross section (data negara)

t = data deret waktu (data periode tahun)



Gambar 1. Plot histogram dari setiap variabel

Hasil dan Pembahasan

Statistik Deskriptif dan Koefisien Korelasi

Studi ini melakukan analisis statistik deskriptif untuk memahami distribusi dan kecenderungan sentral dari variabel-variabel yang terkait dengan efektivitas pemerintah, pengendalian korupsi, dan stabilitas politik. Hasilnya disajikan pada Tabel 2. Berdasarkan 381 observasi, variabel PV untuk Stabilitas Politik memiliki nilai rata-rata 0,57, median 0,59, dan nilai maksimum 0,96. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar negara memiliki tingkat stabilitas politik yang moderat, dengan beberapa negara mencapai tingkat stabilitas yang sangat tinggi. Variabel Corruption Control (CC) memiliki rata-rata 0,47, median 0,43, dan nilai maksimum 0,94. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun beberapa negara memiliki kontrol korupsi yang sangat tinggi, rata-rata global cenderung berada di bawah nilai tengah. Sedangkan untuk Efektivitas Pemerintah 1 (GE1), rata-rata adalah 4,53, dengan median 4,56 dan nilai maksimum 8,47. Hal ini mengindikasikan adanya variabilitas dalam kemampuan pemerintah untuk merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan secara efektif. Data menunjukkan bahwa Efektivitas Pemerintah 2 (GE2) dan Efektivitas Pemerintah 3 (GE3) menunjukkan variasi dalam aspek-aspek tertentu dari efektivitas pemerintah. Secara khusus, GE2 memiliki nilai rata-rata 3,56 dan nilai maksimum 7,70, sedangkan GE3 memiliki nilai rata-rata 7,12 dan nilai maksimum 9,47. Hal ini menunjukkan bahwa aspek-aspek tertentu dari

efektivitas pemerintah, seperti kemampuan beradaptasi dan implementasi kebijakan, berbeda dalam distribusi dan tingkat efektivitasnya di antara negara-negara yang diamati. Variabel Suara dan Akuntabilitas (VA) memiliki nilai rata-rata 0,47, median 0,47, dan nilai maksimum 0,84, yang menunjukkan konsistensi antara nilai rata-rata dan median, dengan sebagian besar negara memiliki tingkat keberhasilan yang moderat dalam memastikan partisipasi dan akuntabilitas publik. Untuk Rule of Law (RL1, RL2, RL3, dan RL4), variabel-variabel ini menunjukkan variasi dalam supremasi hukum dan perlindungan hak-hak hukum dengan nilai rata-rata berkisar antara 4,81 hingga 6,49 dan nilai maksimum 8,19 hingga 9,37, yang mencerminkan perbedaan dalam penerapan dan keefektifan supremasi hukum di seluruh negara.

Tabel 2. Statistik Deskriptif

Variable	n	Mean	S.D.	Min	0.25	Mdn	0.75	Max
PV	381	0.57	0.23	0.00	0.39	0.59	0.77	0.96
CC	381	0.47	0.25	0.00	0.26	0.43	0.71	0.94
GE1	381	4.53	1.66	0.00	3.43	4.56	5.65	8.47
GE2	381	3.56	1.63	0.00	2.23	3.50	4.81	7.70
GE3	381	7.12	1.63	0.00	6.21	7.43	8.35	9.47
VA	381	0.47	0.19	0.00	0.33	0.47	0.61	0.84
RL1	381	4.81	1.68	0.00	3.50	4.69	6.22	8.19
RL2	381	5.65	2.20	0.00	4.00	5.80	7.71	9.37
RL3	381	4.95	1.91	0.00	3.53	4.75	6.69	8.86
RL4	381	6.49	1.55	0.00	5.50	6.53	7.74	9.18

Tabel 3. Matriks Korelasi

Tabel ini menyajikan koefisien korelasi berpasangan antara variabel-variabel yang digunakan untuk pengujian hipotesis (nilai-p dalam tanda kurung dengan signifikansi 10%).

Variables	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
(1) PV	1.000									
(2) CC	0.829*	1.000								
(3) GE1	0.768*	0.664*	1.000							
(4) GE2	0.790*	0.834*	0.856*	1.000						
(5) GE3	0.746*	0.791*	0.586*	0.676*	1.000					
(6) VA	0.865*	0.857*	0.869*	0.893*	0.709*	1.000				
(7) RL1	0.792*	0.860*	0.713*	0.836*	0.706*	0.806*	1.000			
(8) RL2	0.851*	0.914*	0.722*	0.852*	0.775*	0.892*	0.854*	1.000		
(9) RL3	0.830*	0.917*	0.669*	0.843*	0.773*	0.847*	0.907*	0.909*	1.000	
(10) RL4	0.809*	0.869*	0.630*	0.746*	0.857*	0.813*	0.777*	0.888*	0.868*	1.000

Hasil analisis korelasi menunjukkan hubungan yang kuat antara variabel-variabel utama yang berkontribusi terhadap dinamika pemerintahan dan stabilitas politik (disajikan pada Tabel 3). Variabel PV untuk Stabilitas Politik memiliki hubungan yang erat dengan Pengendalian Korupsi (CC), yang menegaskan bahwa peningkatan pengendalian korupsi berhubungan dengan stabilitas politik yang lebih tinggi. Selain itu, terdapat korelasi positif antara Efektivitas Pemerintah (GE1, GE2, dan GE3) dengan PV, yang menunjukkan bahwa aspek-aspek tertentu dari efektivitas pemerintah memiliki dampak yang signifikan terhadap stabilitas politik. Voice and Accountability (VA) juga menunjukkan hubungan yang sangat erat dengan PV, yang mengimplikasikan bahwa peningkatan partisipasi dan akuntabilitas publik dapat memperkuat stabilitas politik. Korelasi antara Rule of Law (RL1, RL2, RL3, dan RL4) dengan PV menunjukkan pentingnya supremasi hukum dan

keadilan dalam mendukung stabilitas politik, dengan RL2 memiliki hubungan yang sangat kuat dengan CC, yang mengisyaratkan adanya hubungan yang erat antara aspek-aspek supremasi hukum dengan upaya pengendalian korupsi.

Analisis Statistik Multivariat

Analisis regresi yang dilakukan dalam penelitian ini memberikan pemahaman mendalam mengenai pengaruh berbagai faktor terhadap Stabilitas Politik (PV) (disajikan dalam tabel hasil regresi, Tabel 4). Pada model pertama, Voice and Accountability (VA) menunjukkan pengaruh yang sangat signifikan terhadap PV dengan nilai p-value kurang dari 0,01 ($\beta = 0,552$, $t = 7,66$), yang mengkonfirmasi pentingnya partisipasi dan akuntabilitas publik dalam menciptakan stabilitas politik. Rule of Law 1 (RL1) juga signifikan pada tingkat p kurang dari 0,05 ($\beta = 0,0146$, $t = 2,05$), sedangkan Rule of Law 4 (RL4) memiliki pengaruh yang lebih kuat dengan p kurang dari 0,01 ($\beta = 0,0246$, $t = 3,01$). Model kedua menunjukkan bahwa Government Effectiveness 1 (GE1) secara signifikan mempengaruhi PV (p kurang dari 0,01, $\beta = 0,0274$, $t = 3,62$), yang menunjukkan bahwa efektivitas pemerintah dalam memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan secara positif mempengaruhi stabilitas politik. VA kembali menunjukkan signifikansi yang tinggi (p kurang dari 0,01, $\beta = 0,292$, $t = 2,71$), dan RL3 mencatat signifikansi pada tingkat p kurang dari 0,05 ($\beta = 0,0197$, $t = 2,23$).

Tabel 4. Hasil Regresi untuk Seluruh Sampel

“Tabel ini menyajikan hasil regresi yang menguji pengaruh efektivitas pemerintah dan pengendalian korupsi terhadap stabilitas politik. Berikut ini adalah model regresinya: $PV_{i,d} = \beta_0 + \beta_1 \sum_{x=1}^3 GE_{(i,d)x} + \beta_2 CC_{i,d} + \beta_3 C_{i,d} + \epsilon$. Variabel $C_{i,d}$ mewakili variabel kontrol, yang meliputi Suara dan Akuntabilitas (VA) dan empat aspek Rule of Law (RL1, RL2, RL3, dan RL4). Tabel tersebut mencakup koefisien regresi dan t-statistik ($\frac{b}{t_{stat}}$). Regresi yang kuat telah disajikan untuk memperhitungkan heteroskedastisitas dan autokorelasi. Tingkat signifikansi dilambangkan dengan ***, **, dan *, masing-masing sesuai dengan 1%, 5%, dan 10%.”

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	PV	PV	PV	PV	PV
CC	0.0491 (0.78)				0.119* (1.81)
GE1		0.0274*** (3.62)			0.0416*** (5.49)
GE2			-0.0108 (-1.35)		-0.0347*** (-4.13)
GE3				0.0205*** (2.98)	0.0152** (2.19)
VA	0.552*** (7.66)	0.292*** (2.71)	0.613*** (6.33)	0.562*** (7.87)	0.318*** (2.72)
RL1	0.0146** (2.05)	0.00492 (0.66)	0.0179** (2.30)	0.0137** (1.97)	0.00499 (0.60)
RL2	0.0101 (0.94)	0.0147 (1.42)	0.0128 (1.26)	0.0121 (1.20)	0.0160 (1.55)
RL3	0.00747 (0.85)	0.0197** (2.23)	0.0110 (1.24)	0.00853 (0.98)	0.0229*** (2.71)
RL4	0.0246*** (3.01)	0.0279*** (3.41)	0.0239*** (2.84)	0.00920 (0.90)	0.00771 (0.74)
_cons	-0.0329 (-1.23)	-0.0740*** (-2.77)	-0.0441* (-1.73)	-0.0724*** (-2.70)	-0.0830*** (-2.80)

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	PV	PV	PV	PV	PV
<i>N</i>	381	381	381	381	381
<i>R²-Adj</i>	0.791	0.799	0.792	0.797	0.810
<i>F_Stat</i>	445.1	434.7	435.9	453.7	304.6
<i>Prob > F</i>	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

Model ketiga memberikan perspektif mengenai pengaruh Efektivitas Pemerintah 2 (GE2) yang tidak signifikan ($p > 0,1$, $\beta = -0,0108$, $t = -1,35$), sementara VA masih menunjukkan signifikansi yang sangat tinggi (p kurang dari $0,01$, $\beta = 0,613$, $t = 6,33$). Dalam konteks ini, RL1 dan RL4 kembali menunjukkan signifikansi yang penting dalam mendukung stabilitas politik. Model keempat dan kelima mengeksplorasi pengaruh lanjutan dari faktor-faktor seperti Efektivitas Pemerintah 3 (GE3) dan Pengendalian Korupsi (CC), yang secara signifikan mempengaruhi PV. Secara khusus, pada model kelima, CC menunjukkan signifikansi pada tingkat p kurang dari $0,1$ ($\beta = 0,119$, $t = 1,81$), dan GE2 menunjukkan pengaruh negatif yang signifikan (p kurang dari $0,01$, $\beta = -0,0347$, $t = -4,13$). Hasil regresi menunjukkan bahwa partisipasi publik, efektivitas pemerintah, dan supremasi hukum secara signifikan berkontribusi dalam menciptakan stabilitas politik. Model ini memiliki nilai adjusted R squared yang tinggi, yang mengindikasikan bahwa variabel-variabel yang dimasukkan dapat menjelaskan sebagian besar variasi Stabilitas Politik. Secara khusus, model kelima memiliki R²-Adj (0,810), F-Stat (304,6), dan Prob > F kurang dari $0,01$, yang menandakan bahwa model tersebut memiliki kekuatan prediksi yang kuat dan signifikan secara statistik.

Analisis regresi memberikan wawasan yang berharga mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Stabilitas Politik (PV) di berbagai negara. Variabel Kontrol Korupsi (CC), yang mengacu pada tidak adanya praktik suap dan korupsi, memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap PV. Temuan ini menegaskan bahwa negara-negara dengan tingkat korupsi yang lebih rendah cenderung memiliki stabilitas politik yang lebih tinggi. Efektivitas Pemerintah 1 (GE1) dan Efektivitas Pemerintah 3 (GE3) menunjukkan korelasi positif yang kuat dengan PV. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah untuk menyesuaikan kebijakan dengan perubahan ekonomi dan menyediakan infrastruktur distribusi yang efisien sangat penting dalam menjaga stabilitas politik. Sementara itu, indikator Efektivitas Pemerintah 2 (GE2), yang mengukur sejauh mana birokrasi menghambat kegiatan bisnis, secara mengejutkan memiliki dampak negatif terhadap PV. Hal ini mungkin menunjukkan bahwa upaya untuk mengurangi hambatan birokrasi terlalu berfokus pada deregulasi dalam beberapa konteks, yang mengarah pada ketidakstabilan jika tidak diimbangi dengan pengawasan dan kebijakan yang efektif.

Analisis tambahan dilakukan dengan membagi sampel menjadi dua kelompok berdasarkan kualitas produk politik. Kualitas produk politik mengacu pada indeks untuk peraturan dan kebijakan yang mendukung lingkungan bisnis yang adil dan kompetitif, seperti perlindungan dari proteksionisme, efisiensi peraturan persaingan, kemudahan akses ke pasar modal, dan transparansi lembaga keuangan. Contohnya termasuk kemudahan memulai bisnis, perpajakan yang tidak menghambat kegiatan ekonomi, dan peraturan ketenagakerjaan dan subsidi yang tidak mengganggu persaingan dan pembangunan ekonomi. Pendekatan ini menawarkan perspektif baru dalam memahami dinamika stabilitas politik (PV) dan faktor-faktor yang mempengaruhinya (Tabel 5). Pengelompokan ini didasarkan pada skor Kualitas Produk Politik, dengan negara-negara yang memiliki skor di atas rata-rata dikategorikan sebagai Kualitas Produk Politik Tinggi, sementara yang di bawah rata-rata sebagai Kualitas Produk Politik Rendah. Pertama, temuan bahwa Kontrol Korupsi (CC) tidak berpengaruh terhadap PV baik di negara dengan Kualitas Produk Politik Tinggi maupun Kualitas Produk Politik Rendah menunjukkan bahwa masalah korupsi secara umum mungkin tidak secara langsung mempengaruhi persepsi stabilitas politik. Hal ini dapat mengimplikasikan bahwa stabilitas politik dipengaruhi oleh faktor-faktor lain selain pengendalian korupsi atau pengaruh pengendalian korupsi terhadap stabilitas politik dimoderasi oleh faktor-faktor lain, seperti kualitas lembaga-lembaga demokratis atau efektivitas pemerintah.

Tabel 5. Hasil Regresi

“Tabel berikut ini menyajikan hasil regresi yang menguji pengaruh efektivitas pemerintah dan pengendalian korupsi terhadap stabilitas politik di negara-negara dengan kualitas produk politik tinggi dan kualitas produk politik rendah. Kualitas produk politik yang tinggi ditunjukkan oleh Model 1 dan 2, sedangkan kualitas produk politik yang rendah ditunjukkan oleh Model 3 dan 4. Model regresi berikut ini adalah: $PV_{i,d} = \beta_0 + \beta_1 \sum_{x=1}^3 GE_{(i,d)x} + \beta_2 CC_{i,d} + \beta_3 C + \epsilon$. Variabel $C_{i,d}$ mewakili variabel kontrol, yang meliputi Suara dan Akuntabilitas (VA) dan empat aspek Rule of Law (RL1, RL2, RL3, dan RL4). Tabel tersebut mencakup koefisien regresi dan t-statistik (b/t_stat). Regresi yang kuat telah disajikan untuk memperhitungkan heteroskedastisitas dan autokorelasi. Tingkat signifikansi dilambangkan dengan ***, **, dan *, masing-masing untuk 1%, 5%, dan 10%.”

	Kualitas Produk Politik yang Tinggi		Kualitas Produk Politik yang Rendah	
	(1) PV	(2) PV	(3) PV	(4) PV
CC	-0.0496 (-0.48)	-0.0207 (-0.22)	0.105 (1.22)	0.144 (1.45)
GE	0.207 (1.45)		0.398** (2.45)	
GE1		0.0588*** (5.70)		0.0430*** (3.32)
GE2		-0.0454*** (-4.66)		-0.0349** (-2.41)
GE3		-0.000862 (-0.08)		0.0214** (2.26)
VA	0.349** (2.19)	0.252 (1.49)	0.485*** (4.14)	0.373** (2.40)
RL1	-0.00404 (-0.31)	-0.0235* (-1.85)	0.0230*** (2.70)	0.0269*** (2.81)
RL2	0.0553*** (2.72)	0.0643*** (3.36)	-0.00137 (-0.12)	0.00493 (0.41)
RL3	0.0128 (0.97)	0.0362*** (2.78)	0.00684 (0.55)	0.0126 (1.05)
RL4	0.00582 (0.36)	0.0186 (0.94)	0.0151 (1.51)	0.00352 (0.30)
_cons	-0.0917 (-0.94)	-0.226** (-2.43)	-0.108*** (-2.79)	-0.120*** (-2.94)
N	183	183	198	198
R ² -Adj	0.619	0.668	0.685	0.699
F_Stat	42.71	45.28	88.15	69.22
Prob > F	0.000	0.000	0.000	0.000

Variabel Government Effectiveness (GE) yang merupakan proksi komposit dari GE1 (kemampuan adaptasi kebijakan pemerintah terhadap perubahan ekonomi), GE2 (birokrasi tidak menghambat kegiatan bisnis), dan GE3 (efisiensi distribusi barang dan jasa), hanya menunjukkan pengaruh yang positif terhadap PV pada negara-negara dengan *Political Product Quality* yang rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa di negara-negara dengan kualitas produk politik yang lebih rendah, peningkatan efektivitas pemerintah dapat menjadi faktor penting dalam meningkatkan stabilitas politik. Hal ini mungkin disebabkan karena di negara-negara tersebut, ruang untuk meningkatkan efektivitas pemerintah lebih besar, sehingga peningkatan tersebut dapat memberikan dampak

yang signifikan terhadap stabilitas politik. Hasil yang konsisten pada efek GE1 dan GE2 di negara dengan Kualitas Produk Politik Tinggi dan Rendah mengkonfirmasi bahwa kemampuan adaptasi kebijakan pemerintah dan pengurangan hambatan birokrasi berkontribusi secara berbeda terhadap stabilitas politik. Efek positif dari GE1 menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah untuk mengadaptasi kebijakannya terhadap perubahan ekonomi adalah penting dalam mempertahankan atau meningkatkan stabilitas politik. Sebaliknya, efek negatif dari GE2 menunjukkan bahwa mengurangi hambatan birokrasi tanpa mempertimbangkan kualitas dan efektivitas kebijakan dapat berdampak negatif terhadap stabilitas politik. Variabel GE3, yang tidak menunjukkan pengaruh di negara-negara dengan Kualitas Produk Politik Tinggi namun berpengaruh positif di negara-negara dengan Kualitas Produk Politik Rendah, menegaskan pentingnya distribusi barang dan jasa yang efisien dalam meningkatkan stabilitas politik, terutama di negara-negara dengan kualitas produk politik rendah. Hal ini menunjukkan bahwa di negara-negara dengan tantangan politik dan ekonomi yang lebih besar, perbaikan infrastruktur dan efisiensi distribusi dapat menjadi kunci dalam memperkuat stabilitas politik.

Pembahasan

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pentingnya pengendalian korupsi dan efektivitas pemerintah dalam menjaga stabilitas politik sejalan dengan tinjauan literatur yang menyoroti hubungan erat antara efektivitas pemerintah, pengendalian korupsi, dan stabilitas politik. Penelitian sebelumnya telah mengindikasikan bahwa efektivitas pemerintah, yang didefinisikan sebagai kemampuan pemerintah untuk merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan secara efisien, merupakan faktor penentu penting bagi stabilitas politik. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah yang responsif dan efisien dalam menyediakan infrastruktur dan layanan publik dapat menciptakan kondisi yang stabil secara politik. Temuan ini sejalan dengan Krishnan dan Teo (2012), yang menekankan bahwa efektivitas pemerintah dapat memperkuat hubungan antara infrastruktur informasi dan pengembangan *e-government*, yang berkontribusi pada praktik tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan stabilitas politik. Sebaliknya, proksi kedua dari efektivitas pemerintah, yang mengukur sejauh mana birokrasi menghambat aktivitas bisnis, menunjukkan efek negatif terhadap stabilitas politik. Hal ini dapat diartikan bahwa dalam beberapa konteks, upaya deregulasi yang bertujuan untuk mengurangi hambatan birokrasi tanpa disertai dengan kebijakan dan pengawasan yang efektif dapat menciptakan ketidakstabilan. Temuan ini memberikan perspektif baru dalam diskusi mengenai deregulasi dan efektivitas pemerintah, yang menunjukkan bahwa keseimbangan antara meminimalkan hambatan birokrasi dan memastikan kebijakan dan pengawasan yang kuat sangat penting.

Selain itu, analisis ini mengkonfirmasi tinjauan literatur tentang hubungan antara pengendalian korupsi dan stabilitas politik. Pengendalian korupsi yang efektif, yang didefinisikan sebagai kurangnya praktik suap dan korupsi, secara signifikan berkorelasi positif dengan stabilitas politik. Temuan ini sejalan dengan penelitian Hassan (2017) and Onafowora & Owoye (2022), yang menyoroti bahwa pengendalian korupsi yang efektif dapat meningkatkan stabilitas politik sekaligus mencegah erosi legitimasi lembaga politik yang dapat menyebabkan ketidakstabilan. Temuan bahwa Pengendalian Korupsi tidak berpengaruh terhadap Stabilitas Politik baik di negara dengan Kualitas Produk Politik Tinggi maupun Rendah menunjukkan bahwa masalah korupsi secara umum mungkin tidak secara langsung mempengaruhi persepsi stabilitas politik. Hal ini dapat mengimplikasikan bahwa stabilitas politik dipengaruhi oleh faktor-faktor lain selain pengendalian korupsi atau pengaruh pengendalian korupsi terhadap stabilitas politik dimoderasi oleh faktor-faktor lain, seperti kualitas lembaga demokrasi atau efektivitas pemerintah. Variabel Efektivitas Pemerintah yang merupakan proksi komposit dari Adaptabilitas Kebijakan Pemerintah terhadap Perubahan Ekonomi, Birokrasi tidak Menghambat Kegiatan Usaha, dan Efisiensi Distribusi Barang dan Jasa hanya menunjukkan pengaruh positif terhadap Stabilitas Politik pada negara dengan Kualitas Produk Politik Rendah. Hal ini menunjukkan bahwa di negara-negara dengan Kualitas Produk Politik yang lebih rendah, peningkatan Efektivitas Pemerintahan dapat menjadi faktor penting dalam meningkatkan Stabilitas Politik. Hal ini mungkin karena, di negara-negara ini, ruang untuk meningkatkan Efektivitas Pemerintahan lebih besar, sehingga peningkatan tersebut dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap Stabilitas Politik.

Hasil yang konsisten pada pengaruh Adaptasi Kebijakan Pemerintah terhadap Perubahan Ekonomi dan Birokrasi tidak Menghambat Kegiatan Bisnis di kedua kelompok Kualitas Produk Politik menegaskan bahwa adaptasi kebijakan pemerintah dan pengurangan hambatan birokrasi memberikan kontribusi yang berbeda terhadap Stabilitas Politik. Pengaruh positif dari Kemampuan Adaptasi Kebijakan Pemerintah terhadap Perubahan Ekonomi menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah untuk mengadaptasi kebijakannya terhadap perubahan ekonomi adalah penting dalam mempertahankan atau meningkatkan Stabilitas Politik. Sebaliknya, pengaruh negatif dari Birokrasi tidak Menghambat Kegiatan Bisnis menunjukkan bahwa upaya untuk mengurangi hambatan birokrasi tanpa mempertimbangkan kualitas dan efektivitas kebijakan dapat berdampak negatif terhadap Stabilitas Politik. Variabel Efisiensi Distribusi Barang dan Jasa yang tidak menunjukkan pengaruh pada negara dengan Kualitas Produk Politik Tinggi namun berpengaruh positif pada negara dengan Kualitas Produk Politik Rendah menegaskan pentingnya efisiensi distribusi barang dan jasa dalam meningkatkan Stabilitas Politik, khususnya pada negara dengan Kualitas Produk Politik rendah. Hal ini menunjukkan bahwa di negara-negara dengan tantangan politik dan ekonomi yang lebih besar, peningkatan infrastruktur dan efisiensi distribusi dapat menjadi kunci dalam memperkuat Stabilitas Politik.

Simpulan

Penelitian ini telah berhasil menegaskan kembali pentingnya pengendalian korupsi dan efektivitas pemerintah dalam menjaga stabilitas politik, sejalan dengan literatur yang menggarisbawahi hubungan erat antara efektivitas pemerintah, pengendalian korupsi, dan stabilitas politik. Efektivitas pemerintahan, yang didefinisikan sebagai kemampuan pemerintah untuk merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan secara efisien, diidentifikasi sebagai faktor penentu penting bagi stabilitas politik. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah yang responsif dan efisien dalam menyediakan infrastruktur dan layanan publik mampu menciptakan kondisi yang stabil secara menyedikit. Temuan analisis bahwa pengendalian korupsi tidak berpengaruh langsung terhadap stabilitas politik baik di negara dengan Kualitas Produk Politik Tinggi maupun Rendah menunjukkan bahwa masalah korupsi dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti kualitas lembaga demokrasi atau efektivitas pemerintah. Lebih lanjut, analisis ini membedakan pengaruh efektivitas pemerintah berdasarkan kualitas produk politik suatu negara, dan menemukan bahwa peningkatan efektivitas pemerintah sangat penting dalam meningkatkan stabilitas politik di negara-negara dengan Kualitas Produk Politik Rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa di negara-negara dengan tantangan politik dan ekonomi yang lebih besar, peningkatan efektivitas pemerintah dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap stabilitas politik.

Penelitian ini telah memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman tentang pengaruh efektivitas pemerintah dan pengendalian korupsi terhadap stabilitas politik. Dengan menyoroti keterkaitan antara faktor-faktor tersebut, penelitian ini menggarisbawahi perlunya pemerintah meningkatkan efisiensi dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan publik serta meningkatkan upaya pengendalian korupsi sebagai strategi utama untuk menjaga stabilitas politik. Selain itu, penelitian ini menawarkan perspektif baru mengenai bagaimana kualitas produk politik suatu negara dapat memoderasi hubungan antara efektivitas pemerintah, pengendalian korupsi, dan stabilitas politik. Sebagai rekomendasi, para pembuat kebijakan dan praktisi di bidang kebijakan publik dan antikorupsi diharapkan dapat menggunakan temuan ini untuk merumuskan strategi yang lebih efektif yang disesuaikan dengan konteks politik dan ekonomi suatu negara. Upaya untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik juga harus diperkuat sebagai bagian dari strategi komprehensif untuk meningkatkan stabilitas politik.

Agenda penelitian di masa depan dapat mencakup studi yang lebih mendalam tentang pengaruh faktor eksternal, seperti perubahan ekonomi global dan konflik internasional, terhadap dinamika antara efektivitas tata kelola pemerintahan, pengendalian korupsi, dan stabilitas politik. Penelitian di masa depan juga dapat berfokus pada pengembangan metodologi yang lebih kompleks untuk mengukur efektivitas tata kelola pemerintahan dan pengendalian korupsi, serta mengeksplorasi bagaimana teknologi informasi dan komunikasi dapat digunakan untuk memperkuat kedua aspek tersebut. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, termasuk keterbatasan

data yang tersedia dan kemampuan generalisasi temuan. Selain itu, analisis ini tidak dapat sepenuhnya menguraikan bagaimana faktor-faktor spesifik dalam efektivitas tata kelola pemerintahan dan pengendalian korupsi secara individual memengaruhi stabilitas politik. Oleh karena itu, penelitian di masa depan diperlukan untuk mengatasi keterbatasan ini dan memperdalam pemahaman tentang mekanisme yang mendasari hubungan ini.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Pelita Harapan atas dukungan yang diberikan melalui penyediaan sumber-sumber referensi yang berharga untuk penulisan artikel ini. Kesediaan Universitas Pelita Harapan untuk memfasilitasi akses terhadap materi penelitian telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kelancaran dan kedalaman analisis yang dilakukan.

Referensi

- Abubakar, S. (2020). Institutional quality and economic growth: Evidence from Nigeria. *African Journal of Economic Review*, 8(1), 48–64. <https://www.ajol.info/index.php/ajer/article/view/192194>
- Alkali, Y. M., Masud, A., & Aliyu, A. A. (2022). Mediating role of trust in the relationship between public governance quality and tax compliance. *Bussecon Review of Social Sciences (2687-2285)*, 3(4), 11–22. <https://doi.org/10.36096/brss.v3i4.276>
- Asongu, S. A. (2013). Fighting corruption in Africa: do existing corruption-control levels matter? *International Journal of Development Issues*, 12(1), 36–52. <https://doi.org/10.1108/14468951311322109>
- Asongu, S. A. (2016). Determinants of growth in fast-developing countries: Evidence from bundling and unbundling institutions. *Politics & Policy*, 44(1), 97–134. <https://doi.org/10.1111/polp.12148>
- Asongu, S. A., & Odhiambo, N. M. (2019). Governance and social media in African countries: An empirical investigation. *Telecommunications Policy*, 43(5), 411–425. <https://doi.org/10.1016/j.telpol.2018.10.004>
- Berdaliyeva, A. S., Kim, A. I., Seraliyeva, A. M., Gassanov, A. A., & Dunentayev, M. V. (2023). Criminological measures to counteract corruption offences in the field of illegal gambling. *Journal of Financial Crime*, 30(1), 4–23. <https://doi.org/10.1108/JFC-11-2021-0246>
- Bergman, U. M., Hutchison, M. M., & Jensen, S. E. H. (2016). Promoting sustainable public finances in the European Union: The role of fiscal rules and government efficiency. *European Journal of Political Economy*, 44, 1–19. <https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2016.04.005>
- Brown, R. J. (2020). The impact of increased tax transparency via public country-by-country reporting on corporate tax aggressiveness: Evidence from the European Union. *Australian Tax Forum*, 35(4), 596.
- Chourou, L., Grira, J., & Saadi, S. (2021). Does empathy matter in corporate social responsibility? Evidence from emerging markets. *Emerging Markets Review*, 46, 100776. <https://doi.org/10.1016/j.ememar.2020.100776>
- Dankumo, A. M., Ishak, S., Oluwaseyi, Z. A., & Onisanwa, I. D. (2019). Does Okun's Law explain the relationship between economic growth and unemployment in Nigeria? *Jurnal Ekonomi Malaysia*, 53(3). <https://doi.org/10.17576/JEM-2019-5303-12>
- Duho, K. C. T., Amankwa, M. O., & Musah-Surugu, J. I. (2020). Determinants and convergence of government effectiveness in Africa and Asia. *Public Administration and Policy*, 23(2), 199–215. <https://doi.org/10.1108/PAP-12-2019-0039>
- Hassan, M., & Zeb, R. (2021). Analysing the impact of good governance on socio-economic development: A case study of Pakistan. *NUST Journal of Social Sciences and Humanities*, 7(1), 1–35. <https://doi.org/10.51732/njssh.v7i1.73>

- Hassan, S. A. (2017). Investigating the relationship of e-government, control of corruption, economic prosperity and environmental degradation: An analysis of Asian region. *International Journal of Innovation and Economic Development*, 3(2), 18–28. <https://doi.org/10.18775/ijied.1849-7551-7020.2015.32.2002>
- Hearn, B. A. (2011). Institutional impact on the expropriation of private benefits of control in North Africa. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1856776>
- Horita, Y., & Takezawa, M. (2018). Cultural differences in strength of conformity explained through pathogen stress: A statistical test using hierarchical Bayesian estimation. *Frontiers in Psychology*, 9, 399830. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.01921>
- Hurduzeu, G., Lupu, I., Lupu, R., & Filip, R. I. (2022). The interplay between digitalization and competitiveness: Evidence from European countries. *Societies*, 12(6), 157. <https://doi.org/10.3390/soc12060157>
- Institute for Management Development. (2023). *Worldwide Governance Indicators*.
- Irac, D., & Lopez, J. (2015). Euro area structural convergence? A multi-criterion cluster analysis. *International Economics*, 143, 1–22. <https://doi.org/10.1016/j.inteco.2015.01.005>
- Kaufmann, D., & Kraay, A. (2023). *Worldwide governance indicators*. World Bank Group. <https://www.worldbank.org/en/publication/worldwide-governance-indicators>
- Khan, R. E. A., & Farooq, S. (2019). Corruption, political instability and sustainable development: The interlinkages. *Journal of Quantitative Methods*, 3(1), 56–83. <https://doi.org/10.29145/2019/jqm/030104>
- Krishnan, S., & Teo, T. S. H. (2012). Moderating effects of governance on information infrastructure and e-government development. *Journal of the American Society for Information Science and Technology*, 63(10), 1929–1946. <https://doi.org/10.1002/asi.22660>
- Kristjánisdóttir, H., & Óskarsdóttir, S. (2021a). The global financial crisis and FDI in Europe. In *Asian Foreign Direct Investment in Europe* (pp. 20–32). Routledge.
- Kristjánisdóttir, H., & Óskarsdóttir, S. (2021b). European FDI in Ireland and Iceland: Before and after the financial crisis. *Journal of Risk and Financial Management*, 14(1), 23. <https://doi.org/10.3390/jrfm14010023>
- Liu, Y., Liang, C. C., & Phillips, F. (2020). Precursors of intellectual property rights enforcement in East and Southeast Asia. *Industrial Marketing Management*, 90, 133–142. <https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2020.06.013>
- Morris, S. D., & Klesner, J. L. (2010). Corruption and trust: Theoretical considerations and evidence from Mexico. *Comparative Political Studies*, 43(10), 1258–1285. <https://doi.org/10.1177/0010414010369072>
- Nae, T. M., Florescu, M.-S., & Bălăşoiu, G.-I. (2024). towards social justice: Investigating the role of labor, globalization, and governance in reducing socio-economic inequality within post-communist countries. *Sustainability*, 16(6), 2234. <https://doi.org/10.3390/su16062234>
- Nawaz, S., Iqbal, N., & Khan, M. A. (2023). The impact of institutional quality on economic growth: Panel Evidence. *The Pakistan Development Review*, 53(1), 15–31. <https://doi.org/10.30541/v53i1pp.15-31>
- Onafowora, O. A., & Owoye, O. (2024). Governance quality and economic growth in the Caribbean in times of Covid-19. *The Journal of Developing Areas*, 58(1), 171–191. <https://doi.org/10.1353/jda.2024.a924521>
- Page, R. A., & Torres Jr, R. J. (2021). As judge and citizen: An ethical path of racial justice. *Court Review: Journal of the American Judges Association*, 57, 72. <https://digitalcommons.unl.edu/ajacourtreview/823/>
- Papageorgiadis, N., Cross, A. R., & Alexiou, C. (2014). International patent systems strength 1998–2011. *Journal of World Business*, 49(4), 586–597. <https://doi.org/10.1016/j.jwb.2013.12.011>

- Poniatowicz, M., Dziemianowicz, R., & Kargol-Wasiluk, A. (2020). Good governance and institutional quality of public sector: Theoretical and empirical implications. *European Research Studies Journal*, 23(2).
- Rashid, H., Warsame, H., & Khan, S. (2021). The differential impact of democracy on tax revenues in developing and developed countries. *International Journal of Public Administration*, 44(8), 623–635. <https://doi.org/10.1080/01900692.2020.1741616>
- Ruiz, S., Arvate, P., & Xavier, W. (2017). Superior economic performance in developed and developing countries. *International Journal of Emerging Markets*, 12(1), 93–107. <https://doi.org/10.1108/IJoEM-12-2014-0213>
- Shah, M. J., Mehmood, T., & Hayat, A. (2019). Governance, economic growth and socioeconomic development in Pakistan. *European Online Journal of Natural and Social Sciences: Proceedings*, 8(4 (s)), pp-20. https://european-science.com/eojnss_proc/article/view/5953
- Tchamyou, V. S. (2021). Financial access, governance and the persistence of inequality in Africa: Mechanisms and policy instruments. *Journal of Public Affairs*, 21(2). <https://doi.org/10.1002/pa.2201>
- Thiao, A. (2021). The effect of illicit financial flows on government revenues in the West African Economic and Monetary Union countries. *Cogent Social Sciences*, 7(1), 1972558. <https://doi.org/10.1080/23311886.2021.1972558>